

# PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF GENDER DAN MULTIKULTURAL

Amiruddin M.  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

## Abstrak

*Education is a unique human activity in a community aims to humanize human, as an important instrument for the empowerment of communities, especially for marginalized communities. In addition, education is also an effort to get gender justice in society. Thus, formal education is a means to socialize as well as to transfer values and norms that prevail in society, including values and norms of gender and cultural diversity. All norms and values are transferred through the text books used as well as the atmosphere developed in learning process.*

## Pendahuluan

Tiga pilar sebagai konsep pembangunan bangsa, yang secara intrinsic mungkin tidak berhubungan satu sama lain, karena ketiganya tumbuh dari akar sejarah yang berbeda, yaitu: Integrasi nasional, multikulturalisme, dan otonomi daerah.

Integrasi nasional tumbuh bersama semangat nasionalisme yang menandai kehidupan politik bangsa-bangsa di dunia hingga masa dua pertiga abad kedua puluh. Sementara multikulturalisme muncul sebagai reaksi internal suatu bangsa terhadap proses anti integrasi, yang antara lain merupakan akibat pengaruh eksternal global, yaitu arus gerakan demokrasi dan hak asasi manusia global yang sering kali lintas bangsa dan tidak mempertimbangkan integritas internal suatu bangsa. Sedangkan otonomi daerah adalah upaya menciptakan keadilan melalui pelimpahan kekuasaan politik dan ekonomi pada masing-masing daerah, yang kemudian ternyata meningkatkan primordialisme baru di berbagai daerah di tanah air.

Ketiga konsep tersebut, menurut Saifuddin,<sup>1</sup> ibarat "3-in-1" yang kemudian menimbulkan banyak persoalan yang sering kali bertentangan karena tidak hanya berasal dari waktu sejarah yang berbeda, tetapi juga dari segi implementasinya yang sering kali saling meniadakan, dan telah menciptakan kerumitan tersendiri bagi bangsa Indonesia kini.

Pendidikan dalam pengertian umum adalah membentuk manusia berbudaya, bukan membentuk manusia berpaham multicultural. Membentuk manusia berbudaya, kata Mattulada,<sup>2</sup> adalah memanusiakan manusia melalui proses pendidikan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan system budaya dan system social, atau juga

<sup>1</sup>Achmad Fedyani Saifuddin. 2006. *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana. h. 364.

<sup>2</sup>Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. h. 111.

disebut sebagai proses *enculturation* dan *socialization*. Pendidikan dalam pengertian seperti ini, akan berisi minimal tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif, menurut Mattulada,<sup>3</sup> muatan yang berisi pemikiran tentang pengembangan intelek, dan substansinya adalah ilmu pengetahuan serta proses pengolahannya pada setiap individu, agar mampu memahami, menguasai, sehingga dapat mengembangkannya dalam system penalaran, untuk menjadi asset rohniah yang tidak membeku, atau memiliki potensi hidup yang langgeng. Aspek afektif, Mattulada,<sup>4</sup> muatan pendidikan yang berisi kemampuan penerimaan dan percapan nilai-nilai moral-etik atau kebajikan, akhlak, untuk mengantisipasi kaedah-kaedah kehidupan social-budaya dalam masyarakat. Aspek psikomotorik, Mattulada,<sup>5</sup> muatan pendidikan yang berisi kemampuan berupa keterampilan untuk menangani sesuatu bagi keperluan dalam kehidupan.

Mendidik ketiga aspek pada diri manusia harus menjadikan dua aspek sebagai rujukan, yaitu masyarakat dan kebudayaan, inilah yang disebut dengan memanusiakan manusia, yaitu memberikan kelengkapan hidup pada setiap manusia untuk memanusiakan dirinya dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai sesuatu kebudayaan yang mejadi tuntunannya. Tilaar,<sup>6</sup> menyatakan bahwa proses pemanusiaan dalam pendidikan harus memperhatikan tututan-tuntutan intergenerasi yaitu pelestarian ekologis dan budaya yang merupakan pula proses intercultural yang melibatkan budaya local, nasional, dan global, menuju terciptanya suatu masyarakat madani global yang berbasiskan masyarakat madani Indonesia dengan cirinya yang khas, yaitu kebudayaan Indonesia yang bhinneka.

Berdasarkan pandangan di atas, maka persoalan diskriminasi dan ketiadaadilan gender harus pula menjadi bagian dari pendidikan yang berwawasan multikultural. Perbedaan gender, sesungguhnya tidak akan menjadi masalah dan dipermasalahakan jika tidak melahirkan ketidakadilan gender. Perbedaan gender ternyata memunculkan pola ketidakadilan, pola itu muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe, atau pelabelan negatif, kekerasan, serta beban kerja yang lebih banyak.

Pendidikan yang berwawasan gender dan multikultural, adalah sebuah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan proses untuk membangun pemahaman dan kebersamaan antar multikultural. Untuk sebuah proses menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, dan kebersamaan serta saling memahami antar multikultural, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dapat menghambat pertumbuhan perdaban madani, multikultural yang Bhinneka Tunggal Ika, yang didalamnya terbangun kebersamaan dan saling memahami antar budaya, agama, dan gender.

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>H.A.R. Tilaar. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bhinneka Tunggal Ika adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat multikultural yang harmonis, di mana perbedaan dan keanekaragaman budaya mampu berfungsi sebagai sumberdaya yang memperkaya pemikiran dan peradaban manusia Indonesia yang selama ini masih menjadi impian.

Konsep Bhinneka Tunggal Ika telah mengalami pemelintiran makna dan bias interpretasi terutama sepanjang pemerintahan Orde Baru, karena pendekatan strategi yang keliru dalam mengelola relasi sosial budaya dengan dalih menjaga keamanan dan kestabilan. Uniformitas atau keseragaman lebih didahulukan daripada apresiasi dan toleransi terhadap perbedaan dan keanekaragaman, hak-hak budaya berbagai komunitas masyarakat tidak mendapat pemenuhan secara adil, multikulturalisme tidak mendapat ruang, sementara monokulturalisme mendominasi.<sup>7</sup>

Menurut Tilaar,<sup>8</sup> konsep pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "inter-kulturalisme" se usai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional, HAM, dan kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Selanjutnya Tilaar<sup>9</sup> menjelaskan, bahwa mempertimbangkan semua perkembangan ini, pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an di Amerika Serikat berkembang konsep pendidikan "intercultural" dan "interkelompok" (intercultural and intergroup education). Pada dasarnya pendidikan interkultural merupakan cross-cultural education yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain itu, juga ditujukan untuk tumbuhnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, gender agama, dan lain-lain.

Kelemahan dalam pendidikan interkultural karena lebih terpusat pada individu dari pada masyarakat, sementara konflik dalam skala luas terjadi bukan pada tingkat individu, melainkan pada tingkat masyarakat sehingga dapat benar-benar mengganggu hubungan bersama di antara warga masyarakat negara-bangsa. Sebab itu pula, pendidikan interkultural dipandang kurang berhasil dalam mengatasi konflik antar golongan dalam masyarakat, dan kenyataan inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multikultural. Menurut Taylor et al,<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Yayah Khisbiyah. 2000. Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme, dalam Shindunata(Ed)*Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius

<sup>8</sup>Tilaar, H. A. R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta, Grasindo, h. 495

<sup>9</sup>Ibid.,

<sup>10</sup>Ibid.,

Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli (indifference) terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural yang rasis dan diskriminatif. Dan dari kerangka inilah, maka konsep pendidikan multikultural dimunculkan sebagai upaya pengembangan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan budaya sikap peduli, dan mau mengerti (difference), atau *politics of recognition* politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "indifference" dan "non-recognition" berakar dari ketimpangan struktur rasial, oleh karena itu paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Karena itu, menurut Tilaar,<sup>11</sup> dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural dominan atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya dapat membuat orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream.

Paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang *ethnic studies* untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan, sejak dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang pendidikan berperspektif gender dan multicultural adalah untuk mencapai pemberdayaan bagi kelompok-kelompok minoritas.

Berdasar dari latar belakang masalah diatas, maka tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan tentang bagaimana konsep dasar pemikiran pendidikan multicultural, dilanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimana wacana pendidikan multicultural di Indonesia, bagaimana pendidikan yang berwawasan gender dalam masyarakat yang multikultural, kemudian diakhiri dengan pertanyaan menggugat mungkinkah wacana pendidikan multicultural dapat diimplementasi dalam realitas pendidikan nasional.

### Konsep Dasar Pemikiran Pendidikan Multikultural

Multikultural atau kemajemukan atau pluralisme, sudah pasti ada pada setiap masyarakat, terutama ketika teknologi transportasi dan komunikasi telah mencapai kemajuan yang sangat pesat, maka multicultural merupakan *inevitable destiny* di tingkat global mondial maupun di tingkat bangsa Negara dan komunitas. Namun, sebagaimana

<sup>11</sup>Tilaar, H. A. R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta, Grasindo, h. 498.

dikatakan Martin Luther King,<sup>12</sup> multicultural dalam masyarakat manusia yang difasilitasi teknologi tersebut rupanya belum mendapatkan pemaknaan spiritual secara benar. Secara teknis dan teknologi kita telah mampu untuk tinggal bersama dalam masyarakat majemuk, namun secara spiritual kita belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang memiliki perbedaan kultur, yang antara lain mencakup perbedaan dalam hal agama, etnisitas, dan kelas sosial.

Masalah inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai konflik sosial yang mengerikan, baik di tingkat internasional atau antarbangsa, maupun di tingkat intra-bangsa, sebagai contoh dikemukakan sebagai berikut:

Contoh di tingkat Internasional antar bangsa, Israel dan Palestina terus berperang untuk saling meniadakan, mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari kalangan sipil yang tak berdosa. Demikian pula halnya dengan pertikaian bersenjata antara Amerika dan Irak; Rusia dan Chechnya, serta Bosnia dan Serbia. Di tingkat intra-bangsa, berbagai contoh juga dapat disebut. Hitler dan Nazinya di Jerman telah membuat jutaan kaum Yahudi kehilangan nyawa, Ku Klux Klan dan *Rednecks* di Amerika Utara atau *Skinheads* di Eropa atas dasar *whitesupremacy* menyiksa dan membunuh kaum kulit hitam dan kulit bewarna lainnya, pertikaian suku Tutsi dan Hutu merobek keharmonisan Rwanda, dan komplik antara Protestan dan Katolik di Irlandia menimbulkan perang saudara berkepanjangan. Sementara itu, kerusuhan sektarian antara kaum muslimin dan kaum kristiani di Ambon, Dayak dan Madura di Sabas, serta Pribumi dan Tioghoa di berbagai kota terus membawa ancaman terhadap kerukunan dan itegrasi bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

Selanjutnya Yayah Khisbiyah<sup>14</sup> mengutip pendapat Allport, Brewer, dan Coleman, bahwa di samping contoh-contoh pertikaian terbuka yang kasat mata seperti di atas, masih banyak lagi contoh lainnya yang lebih subtil dan invisible, yakni berupa ketegangan dan segregasi antar kelompok yang ditimbulkan oleh streatip dan prasangka atau prejudice. Stereotip dan prasangka ini menciptakan hubungan antara kelompok yang iklimnya seperti perang dingin atau bagaikan api dalam sekam yang intensitas suhunya bisa meningkat karena pengaruh trauma sejarah, kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukun, dan ketegangan politik. Jika intensitasnya terus meninggi, maka perang dingin ini dapat meletus menjadi pertikaian terbuka dan kekerasan berdarah seperti yang kita saksikan di banyak wilayah didalam maupun diluar negeri. Beberapa kenyataan pahit itu menunjukkan bahwa sejarah kolektif, kita tidak pernah atau tidak mau belajar tentang bagaimana hidup bersama secara rukun. Secara structural, system politik yang diskriminatif di banyak Negara, termasuk di Indonesia, telah mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan golongan etnis, agama, atau kelas sisoalnya, lalu mengorbankan

<sup>12</sup>Martin Luther King. Dalam Yayah Khisbiyah. Mencari pendidikan Yang Menghargai Pluralisme. Dalam Shindunata (Ed). 2000. *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius. h. 153.

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

konflik dan perang di antara berbagai kelompok tersebut. Secara kultural, agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga dan lembaga pendidikan tampaknya tidak berhasil menanamkan sikap toleran-inklusif dan tidak mampu mengajarkan hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat yang multikultural.

Menyikapi realitas masyarakat dunia seperti ini, yang belum memahami arti hidup bersama dalam kehidupan yang multicultural, dan dunia pendidikan masih gagal dalam menanamkan sikap hidup toleran inklusif, maka UNESCO menetapkan fungsi utama pendidikan menjadi empat, yaitu: *learnig to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*. Fungsi ke-empat ini, *learning to live together* adalah fungsi untuk mengembangkan pembelajaran yang menghargai perbedaan dan kemajemukan. Dari sini konsep pendidikan multicultural digagas dan diwacanakan sebagai solusi pengembangan pendidikan yang relevan untuk masyarakat heterogen.

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:<sup>15</sup>

Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.

Kata R. Stavenhagen, agama, bahasa, dan kelompok minoritas dalam sebuah Negara, seperti penduduk pribumi dari suku pedalaman seringkali menjadi pihak termarjinalkan dan bahkan terkadang mereka harus mengubur kepentingannya, karena kepentingan Negara dan kelompok dominan dalam masyarakat. Selain itu terdapat kelompok masyarakat yang terpaksa mengubur budaya, bahasa, agama, dan tradisi mereka, karena harus diganti dengan norma dan budaya dominan, yang diperkuat oleh sebuah institusi termasuk di dalamnya system pendidikan.

Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya, 4 Juli 1776, baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai Perguruan Tinggi, Amerika Serikat berhasil membentuk bangsanya yang dalam perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka Amerika

<sup>15</sup> Stavenhagen, Rudolfo. 1996. *Education for a Multikultural world*, in Jasque Delors. et all. Learning: the treasure within. Paris: UNESCO.

Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat.<sup>16</sup>

Pendidikan Multikultural dalam Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial sebagaimana dikemukakan oleh Adam Kuper dan Jessica Kuper,<sup>17</sup> dimulai sebagai gerakan reformasi pendidikan di AS selama perjuangan hak-hak kaum sipil Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar atas lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat para pendidik berjuang untuk menjelaskan tingkat kegagalan dan putus sekolah murid-murid dari etnis marginal, beberapa orang berpendapat bahwa murid-murid tersebut tidak memiliki pengetahuan budaya yang memadai untuk mencapai keberhasilan akademik.

J. Banks.<sup>18</sup> 1993 mendeskripsikan evolusi pendidikan multikultural dalam empat fase: (1) ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. (2) diikuti oleh pendidikan multi-etnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. (3) kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. (4) perkembangan teori, riset dan praktisi, perhatian tertuju pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, dan praktisi, dari pendidikan multikultural. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Paulo Freire,<sup>19</sup> berpendapat bahwa pendidikan bukan merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Selanjutnya J. Bank,<sup>20</sup> menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan:

<sup>16</sup>Dewey, John. 1964. *Democracy and Education*, New York: The Mac Millan Company.

<sup>17</sup>Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>18</sup>J. Banks. 1993 *Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. Review of Research in Education*. Lihat pula J. Bank. 1994. *An Introduction to Multicultural Education*. Needham Heights, MA

<sup>19</sup>Muhaemin el-Ma'hady, 2004, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Sebuah Kajian Awal*, From: <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>.

<sup>20</sup>*Ibid.*,

1. Content integration, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. The Knowledge Construction Process, Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
3. An Equity Paedagogy, Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. Prejudice Reduction, Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka
5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

### Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia

Paham multikulturalisme di perkirakan diwacanakan pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli sosiologi Kanada, Charles Hobart ketika dilangsungkan konferensi Dewan Kanada, tentang agama Kristen dan Yesus di Winnipeg (Manitoba) Kanada, namun sebagai wacana politik, resmi dikembangkan di Kanada tahun 1997, yang sebelumnya di Australia tahun 1977-1978.<sup>21</sup>

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru diwacanakan sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang diwacanakan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang apabila hal itu dilaksanakan tidak dengan hati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.<sup>22</sup>

Azyumardi Azra,<sup>23</sup> berpendapat bahwa pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan "monokulturalisme" yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan,

<sup>21</sup> Bagus I Gusti Ngurah. 2001. *Reformasi, Multikulturalisme, dan Masalah politik bahasa di Indonesia*, dikutip oleh, Ketut Sumadi Dalam: *Apresiasi Estetika* => <http://www.isi-dps.ac.id/wp-content/uploads/2010/02/APRESIASI-ESTETIKA-DAN-ETNIS-MULTIKULTUR-DI-INDONESIA.pdf>.

<sup>22</sup> Muhaemin el-Ma'hady, 2004, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Kajian Awal*, From: <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>.

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, 2005, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, From: <http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>.

terjadi peningkatan gejala "provinsialisme" yang hampir tumpang tindih dengan "etnisitas". Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.

Dalam konteks membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh, nilai-nilai kearifan yang dalam hal ini kearifan sosial dan kearifan budaya dapat dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya bersosialisasi dan berinteraksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dengan nilai kearifan sosial dan kearifan budaya, akan berusaha mengeliminir berbagai perselisihan dan konflik budaya yang kurang kondusif. Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Untuk itu, harus berusaha untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi emberio atau mendasari terjadinya konflik, yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi, dan (3) perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*).<sup>24</sup>

Apabila ketiga hal tersebut tidak mampu dieliminir oleh individu maupun kelompok, maka konflik dan benturan antar individu atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi, politik, ideologi, agama akan menjadi sesuatu legal dan lumrah dalam interaksi sosial, karena keringnya nilai-nilai kemanusiaan, keringnya nilai-nilai kearifan sosial, keringnya nilai-nilai kearifan budaya dan keringnya nilai-nilai kearifan moral dalam relasi antar sesama manusia baik secara individu maupun kelompok. Jadi pada tahap ini, komitmen pada nilai-nilai tersebut tidak dapat dipandang hanya berkaitan dengan eksklusivisme personal dan sosial saja atau dengan superioritas kultural saja, tetapi lebih jauh lagi dengan persoalan kemanusiaan, komitmen dan kohesi kemanusiaan termasuk di dalamnya melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal<sup>25</sup>. Ketika manusia berhadapan dengan simbol-simbol, nilai-nilai, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip dan pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan – baik personal maupun komunal – dan kebudayaan yang dihasilkannya. Multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Konsep multikulturalisme seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban<sup>26</sup> dan sebagai wujud masyarakat madani.

<sup>24</sup>Andrik Puwasito, 2003, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm.147

<sup>25</sup>Azyumardi Azra, 2005, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, From: <http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>,

## Mengapa Pendidikan Berperspektif Gender

Alasan dan sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa pendidikan berperspektif gender, karena hampir disemua lini kehidupan masih ditemukan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ada di ruma-rumah, di sekolah, di masyarakat, di kantor, dan diberbagai lapangan kerja.

Ketidakadilan gender diberbagai kehidupan sesungguhnya muncul dari cara pandang masyarakat tentang dua jenis kelamin, misalnya perempuan dianggap mahluk yang lemah, yang wajib dilindungi, cara pandang seperti ini yang kemudian melekatkan sebuah kodrat bagi perempuan bahwa tempatnya di rumah tangga yang berurusan dengan peyiapan makanan, kebersihan rumah, dan pengasuhan anak. Pandangan serupa yang tidak sedikit ditemukan dimasyarakat dan kemudian menjadi penyebab perbedaan perlakuan antar dua jenis gender, bahwa anak laki-laki akan menjadi pemimpin, anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga.

Akibat dari perbedaan perlakuan dari dua jenis gender, ditemukanlah misalnya di sekolah-sekolah bahwa yang menjadi ketua kelas harus laki-laki atau dominasi laki-laki, di masyarakat yang menjadi ketua RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, kepala suku semuanya domonasi laki-laki, demikan halnya di kantor-kantor dan diberbagai perusahaan. Keterwakilan perempuan di pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan di Indonesia belum menunjukkan keterbukaan politik bagi perempuan. Data tahun 2010 menunjukkan keterwakilan perempuan di MPR 8.06 % , DPR 8.08 % , MA 14.89 % , BPK 0 % dan DPA 4,44 %.<sup>27</sup>

Pendidikan berperspektif gender selain merupakan upaya mengoptimalkan potensi peserta didik tanpa diskriminatif dua jenis gender, juga berupaya meningkatkan kesadaran gender pada jajaran birokrat, para pendidik disekolah, oang tua, dan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya keadilan gender.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam sistem pendidikan nasional, melalui Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan PP RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.<sup>28</sup> Sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, melalui sistem pendidikan.

Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Optional Protocol to Cedaw oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Februari 2000. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, From: <http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>.

<sup>27</sup> Yusuf Ernawan dan Sri Sanituti Hariadi. 2006. *Bunga Rampai Masalah Gender dan Multikulturalisme*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

<sup>28</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan PP RI Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pendidikan Serta Wajib belajar*. Bandung: Citra Umbara. 2010.

program dan kegiatan, yang tersurat dalam berbagai dokumen pemerintah dan disusun atas dasar pengakuan terhadap adanya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Indonesia juga mendukung semua kesepakatan Millenium Development Goals (MDG) yang dideklarasikan pada tahun 2000. Komitmen MDG merupakan kelanjutan dari berbagai komitmen internasional untuk mendukung kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, seperti konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komitmen internasional lainnya yang menjadi rujukan MDG adalah Deklarasi Dakar, tentang kebijakan pendidikan untuk semua (Education for All), di mana Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO juga ikut meratifikasi.

Beberapa isi dari kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender adalah:

1. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
2. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat literacy orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
3. Menghapus disparitas gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas.<sup>29</sup>

### Mungkinkah Pendidikan Multikultural

Mungkinkah wacana pendidikan multicultural dapat diimplementasi dalam realitas pendidikan nasional. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan landasan filosofis sebagai pendekatan berpikir dalam melakukan analisis. Mazhab pendidikan kritis menjadi rujukan penulis dalam melakukan analisis masalah ini. Dalam mazhab pendidikan kritis, khususnya teori kritis Mazhab Frankfurt ditemukan teori sebagaimana dikemukakan Joe L. Kincheloe dan Peter McLaren,<sup>30</sup> bahwa kritikalisme adalah mereka yang menggunakan karya-karyanya sebagai bentuk kritisisme social dan cultural yang didasarkan pada asumsi dasar, bahwa semua pemikiran pada dasarnya dimediasi oleh relasi kekuasaan yang dikonstruksi secara social dan historis, mazhab ini mengemukakan pandangan-pandangannya sebagai berikut:

<sup>29</sup> <http://pnfisemarang.blogspot.com/2010/05/kebijakan-pendidikan-berwawasan-gender.html>

<sup>30</sup> Joe L. Kincheloe dan Peter McLaren. Dalam M. Agus Nuryatno. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book. h. 14.

1. Fakta tidak bisa dipisahkan dari nilai dan ideologi. Fakta sosial adalah hasil dari pertarungan dari pelbagai ideologi. Ideologi yang dominanlah yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan wajah sosial suatu masyarakat.
2. Hubungan antara teori dan objek, *signifier* dan *signified*, tidak pernah statis, stabil atau tetap, tetapi dinamis dan dialektis.
3. Bahasa adalah elemen vital dalam pembentukan subjektivitas.
4. Kelompok tertentu dalam suatu masyarakat mendapat keistimewaan (*privileged*) dibanding yang lain dan kondisi seperti itu selalu tidak berubah selama yang tertindas berpikir bahwa kondisi itu natural dan wajar.
5. Praktek-praktek penelitian pada umumnya membawa dampak pada reproduksi sistem penindasan sosial, ras dan gender.<sup>31</sup>

Selanjutnya dalam teori hegemoni Antonio Gramsci, menyatakan: *a social condition in which all aspects of social reality are dominated by or supportive of a single class.*<sup>32</sup> *Single class* menurut Agus Nuryatno,<sup>33</sup> dapat disebut dengan *dominant group* atau kelompok dominan untuk menggambarkan kompleksitas kekuasaan yang sedang bermain.

Konsep hegemoni bisa dipakai sebagai alat analisis untuk memahami mengapa kelompok-kelompok subordinat secara sukarela atau berasimilasi kedalam pandangan dunia kelompok dominan, yang pada gilirannya membuat kelompok ini menjadi mudah untuk terus melanggengkan dominasi dan kekuasaan mereka. Gramsci<sup>34</sup> berpendapat situasi seperti ini memungkinkan karena kelompok dominan menerapkan apa yang dia sebut dengan hegemoni, yaitu *rule by consent and by virtue of moral and intellectual authority*. Dengan demikian untuk mempertahankan posisinya kelompok dominan selalu berupaya untuk mengamankan persetujuan spontan kelompok marginal dengan cara menegosiasikan penciptaan consensus politik dan ideology.

C. Boggs,<sup>35</sup> menjelaskan bahwa proses hegemoni melibatkan penetrasi dan sosialisasi nilai, keyakinan, sikap, dan moralitas di masyarakat yang dimediasi oleh praktek-praktek social, politik, dan ideology. Ketika prinsip-prinsip ini diinternalisasi oleh masyarakat maka akan berubah menjadi *common sense*, yang pada gilirannya mendegradasi fakultas kritis masyarakat dan sebaliknya berpartisipasi dalam proses dominasi dan mau bekerjasama dengan para penindas. Ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa tindakan kelas yang berkuasa sebagai sesuatu yang natural dan normal serta sesuai dengan kepentingan mereka.

<sup>31</sup>Ibid..

<sup>32</sup>Antonio Gramsci. Dalam Livingstone, DW. 1976. *On Hegemony in Corporate Capitalist States. Materialist Structure, Ideological Forms, Class Consciousness and Hegemonic acts*. *Sociological Inquiry*. 46. Vol. 3. No. 4. h. 235.

<sup>33</sup>lihat. M. Agus Nuryatno. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book. h. 33.

<sup>34</sup>Ibid.,

<sup>35</sup>C. Boggs. Dalam Agus Nuryatno. Ibid. h. 35.

Sebagaimana C. Boggs, Antonio Garamsci<sup>36</sup> lebih menegaskan bahwa hegemoni adalah proses pembelajaran, *hegemony is essentially an educational relationship*. Agen-agen yang terlibat dalam hubungan edukatif ini adalah institusi-institusi yang turut membentuk masyarakat sipil, atau institusi-institusi social yang ideologis yang ikut mengkonstruksi basis cultural kekuasaan, seperti hukum, pendidikan, agama, media massa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, institusi-institusi seperti ini tidaklah netral, tapi justru mendukung dan memperkuat hegemoni yang ada, termasuk didalamnya system pendidikan.

Berdasarkan pendekatan teori dan konsep berpikir diatas, mazhab pendidikan kritis menelusuri persoalan-persoalan kontemporer pendidikan dan social sebagai bagian dari ideology social sebagai berikut: (1) Sekolah kapitalisme dan budaya positivism (2) Pendidikan sebagai media mobilitas social (3) Globalisasi, neoliberalisme, dan politik pendidikan (4) Pendidikan inklusif (5) dan budaya pragmatis dalam pendidikan.

Kelima ideology social di atas, tampil sebagai hal yang dinamik dalam hal menentukan kebijakan system pendidikan dan social, karena kelima aspek ini, memiliki kepentingan yang berbeda dalam menata dan membangun system pendidikan dan social. Sehingga pendidikan multikultural yang merupakan sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat adalah hal yang mustahil, bila berhadapan dengan kelima ideologi social yang kini sedang bersaing untuk masuk kedalam sistem sosial dan sistem pendidikan diberbagai negara di dunia. Kenyataan seperti ini, diperkuat oleh teori reproduksi bahwa sekolah hanya akan melayani kepentingan masyarakat dominan dan melanggengkan struktur sosial yang ada. Teori ini beranggapan bahwa reformasi pendidikan akan terbatas dampaknya bila tidak dikaitkan dengan problem kekuasaan struktural dan ketidakadilan ekonomi, karena itu sistem ekonomi secara keseluruhan harus diubah.

## Kesimpulan

Multikulturalisme sebagai paham diperkirakan diwacanakan pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli sosiologi di Kanada, namun sebagai wacana politik, resmi dikembangkan di Kanada tahun 1997, yang sebelumnya di Australia tahun 1977-1978, di Indonesia Multikulturalisme sebagai paham telah ada sejak Indonesia merdeka dengan semboyan bangsa, bhinneka tunggal ika, dan sebagai konsep pendidikan baru diwacanakan pada tahun 2000, namun baik sebagai paham maupun sebagai konsep pendidikan belum menjadi realitas dalam system pendidikan nasional.

Konsep pendidikan multikultural adalah bentuk pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan, berupaya memfasilitasi proses pembelajaran yang menghargai keragaman etnis dan perbedaan, persamaan hak, toleransi dan sikap terbuka. Mengembangkan kompetensi untuk mampu mandiri dan mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pihak lain, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan.

<sup>36</sup> Antonio Garamsci. 1997. *Selections From the Prison Note Books*. New York: International Publisher. h. 350.

Multikulturalisme baik sebagai paham maupun sebagai konsep pendidikan akan berhadapan dengan ideology social yang sangat dominan saat ini, dan pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan manusia yaitu kapitalisme dan budaya positivism, globalisasi dan new liberalisme, selain itu konsep pendidikan multicultural juga akan berhadapan dengan konsep budaya pragmatis dalam pendidikan, dan konsep pendidikan sebagai media mobilitas social. Kesemua ideology ini, tampil dalam dunia pendidikan sehingga akan ada yang menang dan ada yang kalah, yang menang akan menciptakan dominasi yang kuat dan yang kalah akan menjadi pecundang dan mungkin tersingkirkan.

### Daftar Pustaka

- Achmad Fedyani Saifuddin. 2006. *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Antonio Garamsci. 1997. *Selections From the Prison Note Books*. New York: International Publisher.
- ..... Dalam Livingstone, DW. 1976. On Hegemony in Corporate Capitalist States. Materialist Structure, Ideological Forms, Class Consciousness and Hegemonic acts. *Sociological Inquiry*. 46. Vol. 3. No. 4.
- Andrik Puwasito, 2003, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Azyumardi Azra, 2005, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, From: <http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>,
- Bagus I Gusti Ngurah. 2001. *Reformasi, Multikulturalisme, dan Masalah politik bahasa di Indonesia*, dikutip oleh, Ketut Sumadi Dalam: Apresiasi Estetika => <http://www.isi-dps.ac.id/wp-content/uploads/2010/02/APRESIASI-ESTETIKA-DA>
- H.A.R. Tilaar. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- ..... 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
- J. Banks. 1993 *Multicultural Eeducation: Historical Development, Dimension, and Practice. Review of Research in Education*.
- J. Bank. 1994. *An Introduction to Multicultural Education*, Needham Heights, MA
- Joe L. Kincheloe dan Peter McLaren. Dalam M. Agus Nuryatno. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.

- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Ujung Pandang: Hasnuddin University Press.
- M. Agus Nuryatno. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Martin Luther King. Dalam Yayah Khisbiyah. Mencari pendidikan Yang Menghargai Pluralisme. dalam Shindunata (Ed). 2000. *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaemin el-Ma'hady, 2004, Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Sebuah Kajian Awal, From: <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>.
- Stavenhagen, Rudolfo. 1996. *Education for a Multikultural world*, in Jasque Delors (et all), *Learning: the treasure within*. Paris: UNESCO.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan PP RI Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pendidikan Serta Wajib belajar. Bandung: Citra Umbara. 2010.
- Yusuf Ernawan dan Sri Sanituti Hariadi. 2006. *Bunga Rampai Masalah Gender dan Multikulturalisme*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.